



PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG (RENJA) TAHUN 2025

(BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
Bab II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKD Tahun 2023 dan Capaian Renstra BKPKD Tahun 2018-2023	7
2.1.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024	7
2.1.2 Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan	22
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKD	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKD	29
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	45
Bab III. TUJUAN DAN SASARAN BPKD	46
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKD	47
3.3 Program dan Kegiatan Renja BPKD	47
Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKD	58
Bab V. PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	9
Tabel 2.2	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	15
Tabel 2.3	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat Daerah dan Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2024	19
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKD	27
Tabel 2.3	Kelemahan, Kekuatan, Peluang dan Ancaman	30
Tabel 2.4	Pemetaan Permasalahan	31
Tabel 2.5	Isu-isu Strategis Pembanguna Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	33
Tabel 2.6	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan Renja BPKD Tahun 2025	35
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025	49
Tabel 4.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah BPKD tahun 2025	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Proses penyusunan rancangan awal Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Badan Pengelola Keuangan daerah 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun kedua perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang berpedoman pada RPD 2024-2026. Dokumen Renja Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah serta sejalan dengan tujuan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing ;
2. Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas.

Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah dilakukan melalui tahapan, meliputi :

1. Persiapan penyusunan :

Meliputi pembentukan tim penyusun Renja PD Tahun 2025, Pengumpulan hasil evaluasi renja 2023, pengendalian kegiatan tahun 2024.

2. Tahap perumusan rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah, meliputi:

- a. Pengolahan data dan informasi ;
- b. Analisis gambaran pelayanan PD ;
- c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
- f. Perumusan tujuan dan sasaran;
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- h. Perumusan kegiatan prioritas;
- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD;
- j. Penyempurnaan rancangan PD;
- k. Pembahasan forum PD;

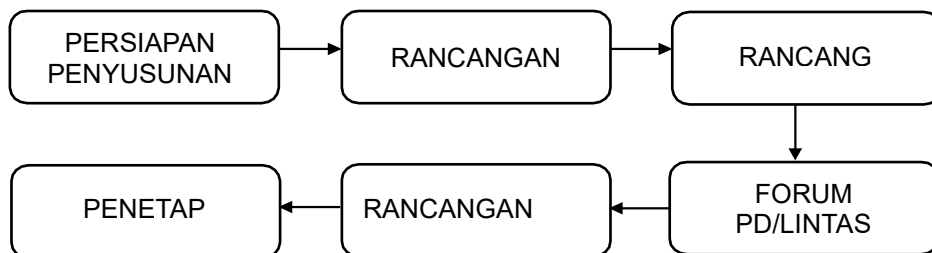
3. Penyusunan rancangan

Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025, Masukan dari pelaksana kegiatan pembahasan oleh tim Badan Pengelola Keuangan Daerah;

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

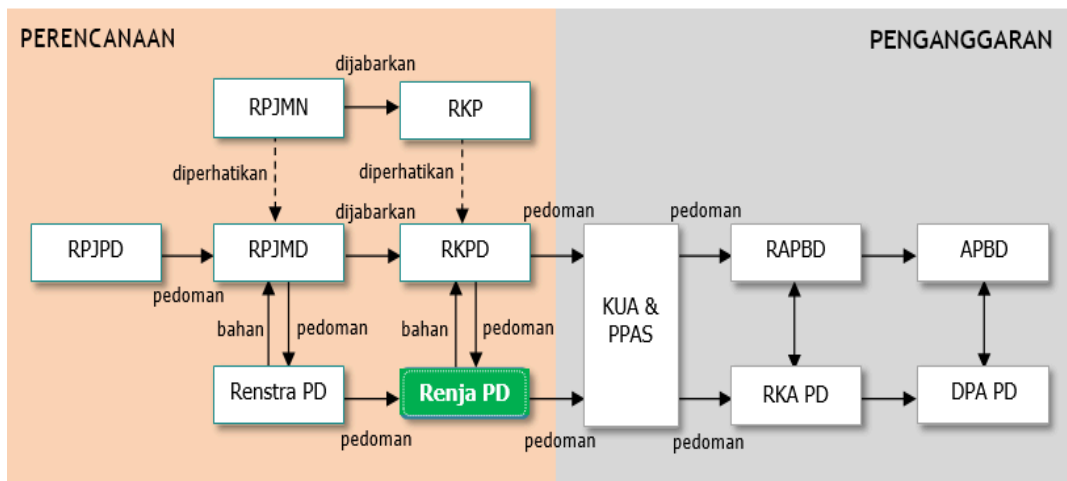
5. Tahap penyajian rancangan Renja PD, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk rancangan akhir;
6. Tahap Penetapan Rencana Kerja PD;

GAMBAR 1.1
Tahapan Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang



Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2024-2026, untuk melihat hubungan antar dokumen dapat kita lihat pada tabel berikut:

Gambar 1.2
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
14. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang adalah:

- a) Menjabarkan Tujuan, Sasaran, program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
- b) Memberikan arahan dan panduan bagi peningkatan sumber-sumber pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam jangka waktu satu tahun;

- c) Memberikan dasar penilaian kinerja penyelenggaraan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kurun waktu satu tahun;
- d) Sebagai Dasar penyusunan program dan kegiatan dalam KUA PPAS tahun 2025;
- e) Menetapkan kegiatan prioritas berdasarkan isu dan masalah yang mendesak agar lebih terarah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024) serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta Program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun n dan Perkiraan Maju tahun n+1

Bab V Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023

Kualitas Renja-PD yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra-PD. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025, perlu diperhatikan hasil evaluasi Renja Tahun 2023 terhadap capaian Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target kinerja Tahun 2024. Hal ini juga perlu dilihat hasil evaluasi terhadap capaian Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018-2023 dengan kinerja Tahun 2023 (tahun ke-lima).

2.1.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara umum, pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik telah mencapai 100%. Begitu juga berdasarkan hasil revidi berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018-2023 realisasi capaian kinerja mencapai 100%.

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Padang Panjang
(Berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023)

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =9	11
3 1	PENUNJANG URUSAN									
3 01 01	PERENCANAAN									
5 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98,00%	98,00%	98,00%	98,77%	100,79%			
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	94,00%	94,00%	94,00%	98,88%	105,19%			
5 01 01 2.0 0001 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN dilngkungan BPKD	156 orang	104 orang	52orang	45 orang	87%			
5 01 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%			
5 01 01 2.0 6 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik bangunan kantor	21 jenis	14 Jenis	7 jenis	7 jenis	100%			
5 01 01 2.0 6 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis alat/ bahan kebersihan kantor yang disediakan, jumlah jenis alat/ bahan computer yang disediakan, Jumlah	135 jenis	90 paket	45 jenis	45 jenis	100%			

[illegible]

5	01	02	2.0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/ waktu maupun ketentuan lainnya	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	100%			
5	01	02	2.0 1	0002	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	6 Dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen dan PPAS Perubahan	6 Dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			
5	01	02	2.0 1	0005	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Ranperda dan Perda APBD serta Ranperwako dan Buku Perwako Pergeseran APBD	18 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%			
5	01	02	2.0 1	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Ranperda dan Perda Perubahan APBD serta Ranperwako dan Perwako Perubahan APBD	12 Dokumen	8 Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%			
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	82%	82%	82%	82%	100%			
5	01	02	2.0 2		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah laporan data hasil rekonsiliasi keuangan daerah dan Jumlah rekonsiliasi pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan	6 Dokumen , 36 Kali	4 Dokumen, 24 Kali	2 Dokumen, 12 Kali	2 Dokumen, 12 Kali	100%			
5	01	02	2.0 2	0001	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Pendampingan operasional pengelolaan keuangan daerah dan upgrade aplikasi SIPD sesuai Permendagri nomor 77 tahun 2020, Jumlah Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok keuangan daerah, Jumlah Peraturan kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah	2 Paket, 2 Tahun, 1 Perda, 1 Perwako	2 Paket, 1 Tahun, 1 Perda, 1 Perwako	1 Tahun, 1 Perda, 1 Perwako	1 Tahun, 1 Perda, 1 Perwako	100%			

					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dan SAP	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%			
5	01	02	2.0 2	2	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah dokumen informasi data laporan SKPD yang akurat per triwulan	6 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan keuangan Akhir tahun	21 Dokumen	14 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%			
5	01	02	2.0 3		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
5	01	02	2.0 3	4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%			
5	01	02	2.0 4	0001	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%			
5	01	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%			
5	01	03	2.0 1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			
5	01	03	2.0 1	0007	Penyusunan Standar Harga	Jumlah buku Standar Satuan harga yang dicetak	60 Buku	30 Buku	30 Buku	30 Buku	100%			
5	01	03	2.0 1	0008	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBMMD serta Dokumen Perubahan RKBMD dan	6 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			

					RKPBMD Kota Padang Panjang								
5	01	03	2.0 3		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Tahunan Aset yang disusun	6 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%		
5	01	03	2.0 3	0008	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Premi Asuransi Barang Milik Daerah yang diasuransikan	11 Polis	8 Polis	3 Polis	3 Polis	100%		
5	01	03	2.0 2		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Proses Penghapusan dan Penjualan BMD	12 Kali	8 Kali	4 Kali	4 Kali	100%		
5	01	03	2.0 2	0008	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah asset unaudited dan audited	6 laporan	4 laporan	2 laporan	2 laporan	100%		
5	05				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	6%	7,5%	2%	2,34%	117%		
5	05	02			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah	34 M	23,2 M	12,2M	14,1 M	117%		
5	05	02	2.02		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	21 dokumen	14 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100,00%		
5	05	02	2.0 2	0001	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan	2 laporan	1 Laporan	1 laporan	100%		
5	05	02	2.0 4		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	42000 Objek Pajak	28000 Objek Pajak	14000 Objek Pajak	14000 Objek Pajak	100%		
5	05	02	2.0 4	0001	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	6 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%		

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang diatas dapat dijelaskan bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan 1 urusan yang terdiri 4 Program, 11 Kegiatan dan 32 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program Penunjang urusan Pemerintah daerah/ Kota dengan target 98% terealisasi sebesar 100,79% berdasarkan Realisasi pencapaian
- b. Program Pengelolaan keuangan Daerah dengan target Tepat waktu terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan atau 100% berdasarkan realisasi pencapaian
- c. Program Pengeloaan Barang Milik Daerah sama halnya dengan Program Pengelolaan Keuangan daerah dengan target tepat waktu juga terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yaitu Tepat waktu atau 100% secara realisasi Pencapaian
- d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Target Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah sebesar 2% terealisasi sebesar 2,34% atau sebesar 117% secara realisasi Capaian

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Kota Padang Panjang
(Berdasarkan Renstra 2024 – 2026)

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =9	11
3 1	PENUNJANG URUSAN									
3 01 01	PERENCANAAN									
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100,00%		100,00%			100 Persen	100 Persen	100%
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%		100%			100 Persen	100 Persen	100%
5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2058 Orang/bulan		686 Orang/bulan			644 Orang/bulan	644 Orang/bulan	100%
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%		100%			100 Persen	100 Persen	100%

5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	98 Paket		63 Paket			63 Paket	63 Paket	100%
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100%		100%			90 Persen	90 Persen	100%
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket		7 Paket			7 Paket	7 Paket	100%
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	135 Paket		45 Paket			45 Paket	45 Paket	100%
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		8 Paket			8 Paket	8 Paket	100%
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1386 Laporan		462 Laporan			462 Laporan	462 Laporan	100%
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%		100%			100 Persen	100 Persen	100%
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		5 Unit			5 Unit	5 Unit	100%
5	01	01	2.07	6	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 Unit							
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen		100 Persen			100 Persen	100 Persen	100%
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		3 Laporan			3 Laporan	3 Laporan	100%

5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan		60 Laporan			60 Laporan	60 Laporan	100%
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		2 Laporan			2 Laporan	2 Laporan	100%
5	01	01	2.08	0004	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah kondisi baik	100 Persen		100 Persen			88 Persen	88 Persen	100%
5	01	01	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	99 Unit		33 Unit			33 Unit	33 Unit	100%
5	01	01	2.09	0001	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	168 Unit		56 Unit			56 Unit	56 Unit	100%
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		1 Unit			1 Unit	1 Unit	100%
5	01	01	2.09	0009	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu			Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/ waktu maupun ketentuan lainnya	Tepat Waktu		Tepat Waktu			Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
5	01	01	2.09	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6 Dokumen		2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5	01	01	2.09	0008	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan	6 Dokumen		2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	100%

[illegible]

[illegible]

5	01	03	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 Dokumen		2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5	01	03	2.03	0008	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6 Laporan		6 Laporan			2 Laporan	2 Laporan	100%
5	05				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	9 laporan		3 laporan			3 Laporan	3 Laporan	100%
					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen		4 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen	100%
5	05	02			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Laporan		24 Dokumen			2 Laporan	2 Laporan	100%
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	76,00%		76,00%			2 Persen	2 Persen	100%
5	05	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah	3 dokumen		3 dokumen			9,9 Milyar	9,9 Milyar	100%
5	05	02	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	27 Dokumen		3 Laporan			9 Dokumen	9 Dokumen	100%
5	05	02	2.02		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	6 Laporan		3 dokumen			2 Laporan	2 Laporan	100%

5	05	02	2.02	0003	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1250 Objek Pajak		3 Dokumen			400 Obyek Pajak	400 Obyek Pajak	100%
5	05	02	2.03		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	216 dokumen		3 dokumen			72 Dokumen	72 Dokumen	100%

Berdasarkan Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Kota Padang Panjang diatas dapat dijelaskan bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan 1 urusan yang terdiri 4 Program, 11 Kegiatan dan 32 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut sementara terkait dengan pencapaian maupun realisasi karena tahun 2024 adalah tahun pertama dari pelaksanaan renstra 2024 – 2026 maka kita hanya memperkirakan realisasi terhadap program, Kegiatan maupun sub kegiatan yang akan kita laksanakan

1. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan anggaran tahun 2024 beserta perkiraan target realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Badan Pengelola Keuangan daerah Tahun 2024

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	2	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.064.180.968	7.887.449.843	97,81%	7.944.832.069	7.944.832.069	100%
5 01 01 2.02	Kegiatan Administrasi	6.326.497.975	5.967.130.985	94,32%	6.329.676.069	6.329.676.069	100%

	Keuangan Perangkat Daerah						
5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.326.497.975	5.967.130.985	94,32%	6.329.676.069	6.329.676.069	100%
5 01 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				31.500.000	31.500.000	100%
5 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-		31.500.000	31.500.000	100%
5 01 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	693.165.553	741.211.144	106,93%	468.928.700	468.928.700	100%
5 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	7.558.253	6.487.000	85,83%	10.330.000	10.330.000	100%
5 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.519.600	89.673.455	76,31%	116.752.400	116.752.400	100%
5 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.921.850	19.195.500	74,05%	13.514.300	13.514.300	100%
5 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	542.165.850	625.855.189	115,44%	328.332.000	328.332.000	100%
5 01 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		205.235.260,0	#DIV/0!	85.446.000	85.446.000	100%
5 01 01 2.07 0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	205.235.260	#DIV/0!	85.446.000	85.446.000	
5 01 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	699.936.400	581.819.116	83,12%	685.873.600	685.873.600	100%
5 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.100.000	3.320.000	54,43%	4.385.200	4.385.200	100%
5 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	163.710.000	127.042.340	77,60%	161.662.000	161.662.000	100%
5 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	530.126.400	451.456.776	85,16%	519.826.400	519.826.400	100%
5 01 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344.581.040	392.053.338	113,78%	343.407.700	343.407.700	100%
5 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	252.171.040	297.904.020	118,14%	250.985.000	250.985.000	100%

5 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.770.000	18.740.000	37,65%	42.440.000	42.440.000	100%
5 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.640.000	75.409.318	176,85%	49.982.700	49.982.700	100%
5 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.821.172.600	787.533.950	27,92%	3.851.124.650	3.851.124.650	100%
5 01 02 2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	704.516.100	663.698.150	94,21%	720.103.550	720.103.550	100%
5 01 02 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	116.949.850	107.564.800	91,98%	119.955.800	119.955.800	100%
5 01 02 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	116.350.200	104.788.400	90,06%	119.969.800	119.969.800	100%
5 01 02 2.01 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	347.604.900	331.093.800	95,25%	349.969.850	349.969.850	100%
5 01 02 2.01 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	123.611.150	120.251.150	97,28%	130.208.100	130.208.100	100%
5 01 02 2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	40.718.600	14.831.000		62.031.000	62.031.000	100%
5 01 02 2.02 0001	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4.000.000	3.831.000	95,78%	24.998.000	24.998.000	100%
5 01 02 2.02 2	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	36.718.600	11.000.000	29,96%	37.033.000	37.033.000	100%
5 01 02 2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan	75.937.900	37.004.800	48,73%	68.990.100	68.990.100	100%

		Perbendaharaan Daerah					
5 01 02 2.03 0003	Koordinasi Pelaksanaan Akutansi Penerimaan dan Pengeluaran kas Daerah	7.888.000	1.903.200	24,13%	6.505.800	6.505.800	100%
5 01 02 2.03 0003	Koordinasi laporan Keuangan SPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	87.828.000	29.453.350	77,86%	48.342.550	48.342.550	100%
5 01 02 2.03 0003	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Propinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	21.330.050	5.648.250	26,48%	14.141.750	14.141.750	100%
5 01 02 2.03 0003	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah Daerah	8.891.850	0	0,00%	-	-	
5 01 02 2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.000.000.000	72.000.000	3,60%	3.000.000.000	3.000.000.000	100%
5 01 02 2.04 0001	Pengelolaan Dana Darurat	2.000.000.000	72.000.000	3,60%	3.000.000.000	3.000.000.000	100%
5 01 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.836.557.297	354.064.098	19,28%	1.162.477.700	1.162.477.700	100%
5 01 03 2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.836.557.297	354.064.098	19,28%	1.162.477.700	1.162.477.700	100%
5 01 03 2.01 0007	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	14.560.050	7.023.050	48,24%	14.907.500	14.907.500	100%
5 01 03 2.01 0008	Penatausahaan Barang Milik Daerah	56.117.300	51.330.400	91,47%	138.810.900	138.810.900	100%
5 01 03 2.01 0008	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.522.770.197	193.280.542	12,69%	774.860.000	774.860.000	100%
5 01 03 2.01 0008	Optimalisasi Penggunaan,Pemanfaatan,Pemindahtanganan,Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	222.890.300	95.688.006	42,93%	211.803.100	211.803.100	100%

5 01 03 2.01 0008	Penyusunan Standar Harga	14.267.650	3.933.350	27,57%	17.132.200	17.132.200	100%
5 01 03 2.01 0008	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.951.800	2.808.750	47,19%	4.964.000	4.964.000	100%
5 05 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	389.093.950	352.319.529	90,55%	369.305.350	369.305.350	100%
5 05 02 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	389.093.950	352.319.529		369.305.350	369.305.350	100%
5 05 02 2.01 0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	127.934.850	177.566.479	138,79%	175.033.400	175.033.400	100%
5 05 02 2.02 0003	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	58.591.800	44.525.550	75,99%	46.273.000	46.273.000	100%
5 05 02 2.03 0002	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	94.041.500	79.200.750	84,22%	97.194.750	97.194.750	100%
5 05 02 2.04 0001	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	108.525.800	51.026.750	47,02%	50.804.200	50.804.200	100%

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, capaian kinerja tahun anggaran 2023 dapat terlaksana dengan baik dengan 4 (Empat) program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) sub kegiatan. Pada Tahun 2023 ada 1 (satu) sub kegiatan yang dihilangkan pada Perubahan Anggaran yaitu kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan oleh Output dari sub kegiatan ini sudah tercapai pada akhir Desember 2022 sehingga pada penyusunan APBD Tahun 2023, Sub kegiatan tersebut tetap kita munculkan sub kegiatan dan kita alokasikan anggarannya

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Penyelenggaraan tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Keuangan di Kota Padang Panjang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran, target evaluasi capaian kinerja sasaran . Disamping itu juga dilakukan pengukuran terhadap capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-						
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Renstra 2018-2023																
1	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah		IKK		WTP	WTP				WTP						
2	Ketepatan Pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan		IKK		Tepat Waktu	Tepat Waktu				Tepat Waktu	Tepat Waktu					
3	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli daerah		IKK		0,03%	5%				0,028%	5,6%					
4	Penyusunan APBD / APBD P yang tepat waktu		IKK		Tepat waktu	Tepat waktu				Tepat waktu	Tepat waktu					
5	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat Waktu		IKK		Tepat waktu	Tepat waktu				Tepat waktu	Tepat waktu					
6	Pelaporan penyajian data Barang Milik Daerah yang tepat waktu		IKK		Tepat waktu	Tepat waktu				Tepat waktu	Tepat waktu					
7	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah		IKK		2	2				2,8	3,4					
8	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan		IKK		22,15	22,15				22,86	21,15					
9	Rasio PAD		IKK		17,62%	18,20%				17,62%	18,43%					
10	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer		IKK		0,69	0,69				0,7	0,85					

	expenditures (%)															
Renstra 2024 - 2026																
1	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah						WTP	WTP	WTP							
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah						71	71,5	72							
3	Penyusunan Produk Anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu		IKK				Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu							
4	Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan Tepat waktu		IKK				Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu							
5	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah		IKK				2%	2%	2%							
6	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan		IKK				21,15%	22,15	22,15							
7	Rasio PAD		IKK				18%	18,5%	19%							
8	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures (%))		IKK				0,69	0,69	0,69							

Adapun hasil analisis dari pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelola keuangan Daerah Tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dengan hasil penilaian dengan penghargaan tertinggi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Penghargaan WTP berhasil di raih Pemerintah Kota Padang Panjang dalam 6 Tahun ber turut turut, dengan demikian artinya seluruh indikator yang menjadi penilaian atas Prestasi tersebut terlaksana dengan baik sesuai ketentuan dan aturan Perundang – undangan yang berlaku
2. Tujuan Ketepatan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan dengan

definisi Operasional kesesuaian Laporan keuangan dengan peraturan perundang – undangan dari awal periode renstra 2018 – 2023 terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yaitu Tepat Waktu (100%) walaupun di dalam pencapaiannya kita hanya menampilkan 2 Tahun Terakhir dari Pencapaian

3. Tujuan yang ketiga yaitu Peningkatan Pendapatan asli daerah pada tahun 2022 tidak tercapai 100% secara realisasi, hal ini disebabkan oleh masih belum pulihnya ekonomi Masyarakat Padang Panjang karena salah satu hal terbesar di pengaruhi oleh Covid 19 yang menyebabkan Perekonomian Indonesia khususnya Padang Panjang sangat besar dampaknya

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, dalam upaya pencapaian visi dan misi BPKD maupun Visi dan Misi pembangunan daerah

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu BPKD sebagai instansi pengelola keuangan daerah perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya Controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen external yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, sebagai berikut :

Dalam Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 – 2023, maka

harus di perhatikan faktor internal seperti kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman guna menentukan langkah-langkah kedepan.

Tabel. 2.3
KELEMAHAN, KEKUATAN, PELUANG DAN ANCAMAN

KELEMAHAN	KEKUATAN
(1) Kurangnya peremajaan SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. (2) Reward dan Punishment belum disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja. (3) Jarang mengikuti diklat fungsional perpajakan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (4) Sarana dan prasarana belum sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.	(1) Tersedianya Perda, Perwal dan Keputusan Gubernur tentang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah (2) Pengalaman empirik dari Sumberdaya Manusia dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. (3) Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah. (4) Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan Walikota Sikap tenggang rasa dari sesama aparat cukup tinggi.
Peluang	Ancaman

(1)	Laju pertumbuhan Ekonomi selama beberapa tahun lalu menunjukkan angka positif dan progresif.	(1)	Fluktuasi ekonomi makro semakin tidak jelas yang berdampak pada ekonomi mikro
(2)	Potensi Wajib Pajak dan Retribusi mengalami tren kenaikan yang positif.	(2)	Ketidaksabaran masyarakat dalam menghadapi globalisasi
(3)	Pusat Kegiatan Wilayah menjadi daya magnet terhadap hak dan kewajiban daerah	(3)	Kebebasan dalam mengakses informasi keuangan melalui dunia maya.
		(4)	Perubahan aturan yang cepat mendorong penata usahaan keuangan tidak sesuaikan dengan kondisi yang ada
		(5)	Pekerjaan bertumpuk dalam waktu bersamaan

Jika kita lihat pada akar permasalahan sehingga Belum terlaksananya tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

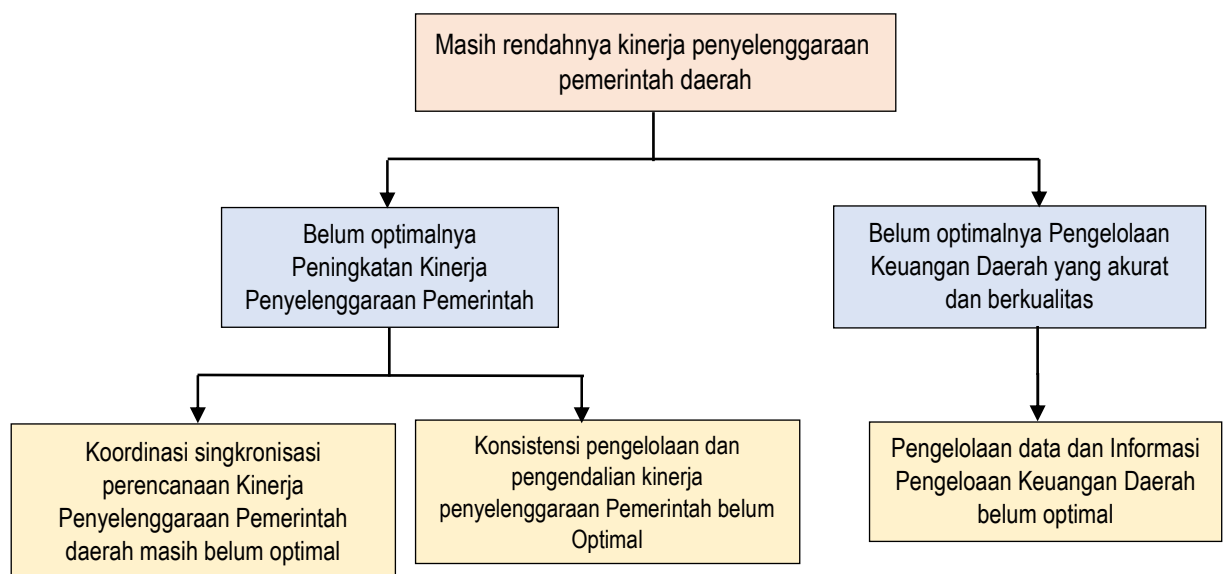
Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kota Padang Panjang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
1.	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang keuangan daerah belum optimall	Laporan-Laporan yang berkaitan dengan bobot penilaian Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi antar OPD terkait 6 dimensi yang menjadi point dalam Penilaian Indeks Pengelola Keuangan Daerah yang belum berjalan dengan baik	
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akurat dan berkualitas	Perubahan Aturan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus sesuai dengan Peraturan maupun	Mensosialisasikan kepada seluruh OPD terkait dengan perubahan-perubahan aturan terkait laporan Keuangan	
			Batasan waktu penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
		ketentuan Perundang – undangan yang berlaku		

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang

Gambar 2.1
POHON MASALAH
BPKD KOTA PADANG PANJANG



Sumber : BPKD Kota Padang Panjang

Berdasarkan analisis dan Penjabaran akara permasalahan di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD 3(tiga) tahun ke depan, adalah :

1. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang keuangan daerah

Didalam Pelaksanaan Peningkatan Peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah dengan meningkatkan kinerja di bidang Pemerintah Daerah baik itu berupa Laporan-laporan yang berkaitan dengan bobot penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah , Peningkatan Pendapatan asli Daerah dan juga dalam hal penganggaran

2. Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan PAD

Di dalam Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan PAD yang menjadi permasalahan yang harus ditindak lanjuti adalah objek/ Wajib Pajak yang tidak mau membayar Pajak atau menyetorkan Pajak sesuai dengan nominal seutuhnya, karena jika hal ini tidak di tindak lanjuti secara serius akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Jika Kita lihat pada Isu strategis pembangunan Kota Padang Panjang untuk penentuan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel tabel berikut:

Tabel 2.5
Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Isu Utama	Isu Strategis
1	Isu Pembangunan Manusia	a. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami perempuan dalam merasakan manfaat pembangunan d. Peningkatan daya saing kepemudaan dan prestasi keolahragaan
2	Isu Tata Kelola Pemerintahan	a. implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi
3	Isu Pembangunan Ekonomi	a. Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan daerah b. Masih rendahnya nilai Investasi c. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran d. rendahnya pendapatan masyarakat
4	Isu Tatahan Kehidupan Masyarakat	a. Mulai lunturnya nilai-nilai Adat dan Budaya di tengah masyarakat b. Masih terbatas pemahaman masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai keagamaan c. Belum optimalnya layanan ketentraman dan ketertiban umum d. penyelenggaran layanan kesejahteraan sosial
5	Isu kualitas infrastrutur dan lingkungan hidup	a. layanan infrastruktur dasar b. kesesuaian pemanfaatan ruang c. kualitas air, udara, tutupan lahan

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal RKPD, maka ada beberapa program dan kegiatan pada Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah dijadikan program dan kegiatan prioritas kedua. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025. Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dengan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan (sesuaikan dengan PI)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Pelaksanaan	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				12.170.718.352					15.820.322.322	3.649.603.970	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				12.170.718.352					13.320.322.322	3.649.603.970	
	Kuangan				11.170.718.352					13.320.322.322	4.649.603.970	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100,00%	6.799.539.876	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100,00%	8.480.402.322	2.471.159.196	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	5.351.456.276	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	6.384.166.322	1.032.710.046	

X.XX.01 .2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	5.351.456.276	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	644 Orang/bulan	6.384.166.322	1.032.710.046	
X.XX.01 .2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	508.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		91 Persen	446.824.400	(61.175.600)	
X.XX.01 .2.05.00 02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	8.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	7 Paket	15.494.500	7.494.500	
X.XX.01 .2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	70.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	9 Paket	116.752.400	46.752.400	
X.XX.01 .2.06.00 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	8 Paket	14.577.500	(15.422.500)	
X.XX.01 .2.06.00 04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1392 orang/kegiatan	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	462 Laporan	300.000.000	(100.000.000)	
X.XX.01 .2.06.00 05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100 Persen	415.760.000	365.760.000	
X.XX.01 .2.06.00 09	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang	6 Unit	63.580.000	13.580.000	

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Unit	352.180.000	352.180.000	
X.XX.01.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	584.392.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100 Persen	935.400.000	351.008.000	
X.XX.01.2.07.00.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	3 Laporan	4.400.000	(1.600.000)	
X.XX.01.2.07.00.05	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	163.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang	60 Laporan	163.000.000	-	
X.XX.01.2.07.00.06	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	415.392.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	2 Laporan	768.000.000	352.608.000	
X.XX.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100%	305.691.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik		90 Persen	298.251.600	(7.440.000)	
X.XX.01.2.08.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Roda dua)	29 Unit	205.691.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Padang Panjang	34 Unit	205.691.600		

			Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Roda empat)	7 unit								
X.XX.01 .2.08.00 02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang	56 Unit	43.580.000	(6.420.000)	
X.XX.01 .2.08.00 04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang	1 Unit	48.980.000	(1.020.000)	
X.XX.01 .2.09	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Padang Panjang	Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat Waktu	2.786.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu		Tepat Waktu	5.972.908.750	3.186.908.750	
			Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan keuangan	Tepat Waktu			Ketepatan Waktu Penyampaian laporan Keuangan		Tepat Waktu			
X.XX.01 .2.09	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Padang Panjang	Penyusunan APBD/ APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/ waktu maupun ketentuan lainnya	Tepat Waktu	720.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/ waktu maupun ketentuan lainnya		Tepat Waktu	716.483.800	(3.516.200)	
X.XX.01 .2.09.00 11	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	120.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Padang Panjang	2 Dokumen	118.339.400	(1.660.600)	
5.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	120.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Padang Panjang	2 Dokumen	119.912.400	(87.600)	

						Perubahan PPAS						
5.01.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Padang Panjang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 dokumen	350.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Padang Panjang	6 Dokumen	349.176.000	(824.000)	
5.01.02.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Padang Panjang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	130.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Padang Panjang	4 Dokumen	129.056.000	(944.000)	
5.01.02.2.01.00 05	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Padang Panjang	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	88%	5.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Padang Panjang	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	88%	61.948.000	56.948.000	
5.01.02.2.01.00 02	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6 Dokumen	5.000.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan	6 Dokumen	61.948.000	56.948.000	

						Instansi Terkait		atas SP2D dengan Instansi Terkait				
								Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	65 Orang			
5.01.02. 2.02.00 01	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tepat Waktu	61.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tepat Waktu	178.476.800	117.476.800	
5.01.02. 2.03	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	7.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	6.556.200	-443.800	
5.01.02. 2.03.00 03	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	30.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	93.104.100	63.104.100	

								Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapata-Lo	1 Dokumen			
5.01.02.2.04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	24.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	78.816.500	54.816.500	
5.01.03	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	100,00%	2.000.000.000	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	100,00%	5.081.019.650	3.081.019.650	

5.01.03.2.01.00.07	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	5.081.019.650	3.081.019.650	
5.01.03.2.01.00.08	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Padang Panjang	Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan Tepat waktu	Tepat Waktu	1.295.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu		Tepat Waktu -	810.170.000	(484.830.000)	
5.01.03.2.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	100%	1.295.000.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu		100 Persen	810.170.000	-484.830.000	
5.01.03.2.02.00.08	Penyusunan Standar Harga	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Standar Harga	Kota Padang Panjang	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	114.626.000	99.626.000	
5.01.03.2.02.00.09	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	16.635.000	1.635.000	
5.01.03.2.03.00.010	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	40.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	151.849.000	111.849.000	
5.01.03.2.03.00.011	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 laporan	1.000.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	290.930.000	(709.070.000)	
5.01.03.2.03.00.012	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	220.000.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	218.850.000	#VALUE!	

5.01.03. 2.03.00 013	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	5.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	17.280.000	12.280.000	
5.05.02. 2.01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Padang Panjang	Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	2%	290.178.476	PROGRAM PENGELOLA AN PENDAPATA N DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah		2 Persen	556.841.250	266.662.774	
5.05.02. 2.01.00 02	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah	#####	290.178.476	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah		9,9 Milyar	556.841.250	266.662.774	
5.05.02. 2.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1dokumen	90.000.000	Analisa dan Pengembang an Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembang an Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	168.646.500	78.646.500	
5.05.02. 2.02.00 03	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	30.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	241.000.000	211.000.000	
5.05.02. 2.03	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Padang Panjang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	14000 Obyek pajak	100.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan	Kota Padang Panjang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	400 Obyek Pajak	97.194.750	-2.805.250	

						Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						
5.05.02.2.03.00.02	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	72 Dokumen	70.178.476	Pengendalian , Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	72 Dokumen	50.000.000	(20.178.476)	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak Usulan terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2025 diharapkan menjadi tahun tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, untuk saat ini Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2024 untuk masa periode 2025 – 2029 sehingga untuk pembuatan Rancangan awal Renja 2025 untuk sementara waktu kita masih mengacu kepada Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024 yaitu "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan public.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta Major Project dalam RKP Tahun 2025 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Keuangan maka kebijakan dan langkah strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan daerah;
2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD;

3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah

Dalam rangka pencapaian target kerja untuk tiga tahun ke depan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang perlu menetapkan tujuan sebagai langkah awal pelaksanaan tugas.

TUJUAN

Yang Menjadi tujuan kedepan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah ***“Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan Daerah “***

SASARAN

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah ***” Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akurat dan Berkualitas ”***

Serta yang akan menjadi Indikator Kinerja sasaran dan tujuan adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Skor IPKD ini dapat diukur melalui 6 (enam) dimensi yaitu :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Pengalokasian anggaran Belanja dalam APBD;
3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Penyerapan anggaran;
5. Kondisi Keuangan daerah;
6. Opini BPK atas LKPD.

3.3 Program Dan kegiatan Renja Badan Pengelola Keuangan daerah

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
2. Penetapan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026
3. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun kelima, serta Renja Bappeda sampai dengan Tahun 2023.
4. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Bappeda.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari 4 Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan 12 Kegiatan serta 32 Sub kegiatan guna mendukung seluruh sasaran Maupun Tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2024 – 2026 . Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat rincian Program, kegiatan maupun sub kegiatan serta Target yang akan di capai Tahun 2025 pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Tolok Ukur	Target
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				15.820.322.322					11.427.147.876
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				Pagu Indikatif (Rp.)					
5	02				KEUANGAN				15.820..322.322					11.427.147.876
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah		100 Persen	8.480.402.322			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 Persen	6.938.647.876
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	6.384.166.322			Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 Persen	5.338.129.181
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	644 Orang/bulan	6.384.166.322	DAU		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	644 Orang/bulan	5.338.129.181

5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		91 Persen	446.824.400			Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	92 Persen	545.827.095
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	7 Paket	15.494.500	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	8.000.000
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	9 Paket	116.752.400	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	70.000.000
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	8 Paket	14.577.500	DAU		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	67.827.095
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	462 Laporan	300.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462 Laporan	400.000.000
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100 Persen	415.760.000			Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	50.000.000
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang	6 Unit	63.580.000	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	50.000.000
5	02	01	2.07	0007	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Unit	352.180.000	DAU		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	

5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100 Persen	935.400.000			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	699.000.000
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	3 Laporan	4.400.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	6.000.000
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang	60 Laporan	163.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	163.000.000
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	2 Laporan	768.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	530.000.000
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik		90 Persen	298.251.600			Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	91 Persen	305.691.600
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Padang Panjang	34 Unit	205.691.600	DAU		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	205.691.600
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang	56 Unit	43.580.000	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	50.000.000
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang	1 Unit	48.980.000	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000

5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu		Tepat Waktu	3.472.908.750			Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat Waktu	2.795.500.000
						Ketepatan Waktu Penyampaian laporan Keuangan		Tepat Waktu						
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/ waktu maupun ketentuan lainnya		Tepat Waktu	716.483.800			Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/ waktu maupun ketentuan lainnya	Tepat Waktu -	720.000.000
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Padang Panjang	2 Dokumen	118.339.400	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	120.000.000
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Padang Panjang	2 Dokumen	119.912.400	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	120.000.000
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Padang Panjang	6 Dokumen	349.176.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dokumen	350.000.000
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Padang Panjang	4 Dokumen	129.056.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	130.000.000
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK		83 Persen	61.948.000			Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	84 Persen	4.500.000

5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Padang Panjang	12 Dokumen 65 Orang	61.948.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	4.500.000
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dan SAP		Tepat Waktu	113.457.300			Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dan SAP	Tepat Waktu	71.000.000
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Padang Panjang	4 Laporan	6.556.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	8.000.000
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Padang Panjang	7 Laporan	93.104.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	39.000.000
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapata-Lo		1 Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapata-Lo	1 Dokumen	

5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	2 Dokumen	13.797.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	24.000.000
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan		100 Persen	5.081.019.650			Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	100 Persen	2.000.000.000
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Padang Panjang	1 Laporan	5.081.019.650	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.000.000.000
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu		Tepat Waktu -	810.170.000			Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu	Tepat Waktu -	1.313.000.000
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu		100 Persen	810.170.000			Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	100 Persen	1.313.000.000
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kota Padang Panjang	2 Dokumen	114.626.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	15.000.000
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	2 Dokumen	16.635.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	15.000.000

5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	2 Laporan	151.849.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	56.000.000
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	3 Laporan	290.930.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	1.000.000.000
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	4 Dokumen	218.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	220.000.000
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	2 Laporan	17.280.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	7.000.000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah		2 Persen	556.841.250			Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	2 Persen	380.000.000
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah		9,9 Milyar	556.841.250			Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah	10,1 Milyar	380.000.000
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	9 Dokumen	168.646.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	130.000.000

5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	2 Laporan	241.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	50.000.000
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kota Padang Panjang	400 Obyek Pajak	97.194.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	450 Obyek Pajak	100.000.000
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	72 Dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	72 Dokumen	100.000.000

Berdasarkan Tabel TC.31 diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Program dan kegiatan diatas hampir sama persis dengan Usulan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah 2024 – 2026, tetapi pada kolom sub kegiatan kita mengusulkan satu sub kegiatan baru Dimana sub kegiatan ini sangat berpengaruh terhadap Percepatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga Sub kegiatan Rekonsiliasi data dan verifikasi aset, kewajiban ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban Jumlah kita usulkan pada Renja 2025 walaupun secara Pagu besar kita tidak melebihi dari yang di alokasikan tetapi jika kita lihat dari pagu sub kegiatan yang kita usulkan pada Renstra 2024-2026 banyak berubah namun secara target pencapaiannya, seluruh Indikator Program sampai pada Sub kegiatan terukur dengan Jelas Target, output maupun outcome yang akan dihasilkan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta Review Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025. Secara umum Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota padang Panjang bertugas menkoordinasikan pencapaian 2 (dua) indikator tujuan yaitu : “Indeks Pengelola Keuangan Daerah dan Opini BPK ;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian daerah, serta infrastruktur pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan daerah Kota Padang Panjang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.
8. Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana table 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Badan Pengelola Keuangan daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			14.820.322.322,00					13.114.953.876,00
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			14.820.322.322,00					13.114.953.876,00
	5	02				KEUANGAN			14.820.322.322,00					13.114.953.876,00
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	8.480.402.322,00				100 %	7.526.827.876,00
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.384.166.322,00			-	100%	5.338.129.181,00
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	644 Orang/bulan	6.384.166.322,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	686 Orang/bulan	5.338.129.181,00
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	91 %	446.824.400,00			-	92%	543.827.095,00
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	15.494.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7 Paket	6.000.000,00
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	116.752.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	45 Paket	70.000.000,00
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	14.577.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8 Paket	67.827.095,00
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462 Laporan	300.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	462 Laporan	400.000.000,00
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD yang tuntas dilaksanakan	100 %	415.760.000,00			-	100%	402.180.000,00
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	352.180.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		352.180.000,00
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	63.580.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Unit	50.000.000,00
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	935.400.000,00			-	100%	937.000.000,00
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	4.400.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 Laporan	6.000.000,00

	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	163.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	60 Laporan	163.000.000,00
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	768.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Laporan	768.000.000,00
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	90 %	298.251.600,00		-	91%	305.691.600,00
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	205.691.600,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	33 Unit	205.691.600,00
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	43.580.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	56 Unit	50.000.000,00
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	48.980.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Unit	50.000.000,00
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat Waktu -	4.972.908.750,00			Tepat Waktu -	3.795.500.000,00
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat Waktu	716.483.800,00		seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	Tepat Waktu	720.000.000,00
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS							

							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	118.339.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	2 Dokumen	120.000.000,00
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	119.912.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	2 Dokumen	120.000.000,00
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD								
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dokumen	349.176.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	6 Dokumen	350.000.000,00
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD								
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	129.056.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	4 Dokumen	130.000.000,00
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	84 %	61.948.000,00			-	85%	4.500.000,00
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait								
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	9 Dokumen	61.948.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	4.500.000,00
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dengan SAP	Tepat Waktu	113.457.300,00			-	Tepat Waktu	71.000.000,00
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah								

							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8 Laporan	6.556.200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Laporan	8.000.000,00
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah								
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	93.104.100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7 Laporan	39.000.000,00
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota								
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	13.797.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	24.000.000,00
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	100 %	4.081.019.650,00			-	100%	3.000.000.000,00
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak								
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	4.081.019.650,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	3.000.000.000,00
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu	Tepat Waktu -	810.170.000,00				Tepat Waktu -	1.412.626.000,00
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	100 %	810.170.000,00			-	100%	1.412.626.000,00
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga								

							Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	114.626.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	114.626.000,00
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	16.635.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	15.000.000,00
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	151.849.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Laporan	56.000.000,00
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	290.930.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 Laporan	1.000.000.000,00
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	218.850.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Dokumen	220.000.000,00
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	17.280.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Laporan	7.000.000,00
4	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	2 %	556.841.250,00				2 %	380.000.000,00
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah	10,1 Milyar	556.841.250,00			-	10,3Milyar	380.000.000,00
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah								

						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	168.646.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	9 Dokumen	130.000.000,00
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	241.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Laporan	50.000.000,00
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)							
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	400 Obyek Pajak	97.194.750,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	500 Obyek Pajak	100.000.000,00
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	72 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	72 Dokumen	100.000.000,00
	J U M L A H							14.820.322.322,00					13.114.953.876,00

BAB V

PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen pengelolaan keuangan ditingkat OPD, BPKD telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah (Renstra BPKD) Tahun 2024 - 2026 yang memuat Tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 3 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi BPKD. Kemudian terkait dengan perencanaan tahunan daerah maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing masing.

Sehubungan dengan ini maka BPKD juga menyusun dan menetapkan Rancangan akhir Rencana Kerja BPKD (Renja BPKD) tahun 2025. Rancangan awal Renja BPKD ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja BPKD ini sangat tergantung pada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf BPKD. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur BPKD, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja BPKD juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur BPKD dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik

Dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2025, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja BPKD dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Padang Panjang, Juli 2024

Pih. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ZIA UL FIKRI, SE

NIP. 19811026 200802 1 001